

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KESEDIAAN PELANGGAN PDAM DIPERUMAHAN BAITI JANNATI TERHADAP PEMBAYARAN JASA LINGKUNGAN DI KABUPATEN SUMBAWA

Ryan Hardiansyah¹, Nopan Ramadhan²

^{1,2}Program Studi Kewirausahaan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa

ryan.hardiansyah@uts.ac.id¹, nopanrama12@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesediaan pelanggan pdam di perumahan baiti jannati untuk membayar jasa lingkungan dan Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelanggan PDAM untuk membayar jasa lingkungan di perumahan baiti jannati Sumbawa. dianalisis dengan menggunakan spss 25. Berdasarkan hasil penelitian mengenai kesediaannya untuk membayar pembayaran jasa lingkungan terdapat 45 responden (67 persen) yang bersedia membayar pembayaran jasa lingkungan. Sedangkan 22 responden (33 persen) tidak bersedia membayar pembayaran jasa lingkungan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membayar dari responden di perumahan baiti jannati yang dilakukan dengan analisis regresi logistik. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa variabel umur, keluarga yang di tanggung, pekerjaan dan pendidikan terakhir, tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesediaan membayar. sedangkan pendapatan ,yaitu nilai signifikansi 0.016 lebih kecil dari nilai 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis di terima yaitu variabel jumlah pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kesediaan membayar. dan sisanyadijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Kata kunci :perumahan baiti jannati,kesediaan membayar,dan faktor-faktor yang mempengaruhi

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam keanekaragaman hayati maupun non hayati yang terkandung didalamnya. Dalam hal ini terdapat berbagai makhluk hidup yang membutuhkan kehidupan untuk bertahan hidup seperti kebutuhan akan air untuk bertahan hidup dalam jangka waktu tertentu tanpa makanan. Kebutuhan akan air ini akan terus dibutuhkan sampai akhir kehidupan karena jika tidak ada air makhluk hidup tidak akan dapat bertahan dalam waktu tertentu. Seperti yang dikemukakan oleh Merryana (2009).

Seiring berjalannya waktu peningkatan jumlah penduduk akan mengakibatkan peningkatan kebutuhan air terutama kebutuhan akan air bersih. Air bersih sangat dibutuhkan untuk melanjutkan kehidupan. Dalam hal ini ketersediaan air bersih yang tersedia di alam semakin buruk yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri, kondisi yang semakin buruk mengakibatkan ketersediaan air akan semakin berkurang bahkan banyak sumber-sumber mata air bersih yang telah kering dan menjadi tandus. Hal ini akan menyebabkan ketersediaan air bersih akan semakin sulit didapatkan dan bahkan terjadi banyak kekeringan dimana-mana pada musimmusim tertentu. Karena permasalahan akan air bersih dalam kebutuhan sehari-hari menjadikan tantangan utama dalam belahan bumi (Dewantara dkk, 2018).

Dalam hal ini karena ketersediaan air berkurang menyebabkan nilai keinginan konsumen PDAM dalam membayar secara agregat menjadi terbengkalai akibat pelayanan yang tidak memuaskan. Keterlambatan pembayaran mengakibatkan proses perbaikan menjadi terbengkalai. Namun kebutuhan pendanaan konservasi.tangkapan juga mendesak untuk meminta jasa baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari pemanfaatan jasa lingkungan air (pembangkit listrik, air minum, air produksi dan lain sebagainya) agar dapat dijadikan dana untuk pendanaan konservasi (Yunus dan Haryanto, 2019).

Didaerah Sumbawa khususnya perumahan baiti jannati merupakan salah satu perumahan padat dan memiliki penduduk yang lumayan banyak, oleh karena itu pasokan air bersih sangat banyak dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan warga, dimana masyarakat sangat banyak membutuhkan air. Karena dipagi hari masyarakat lebih banyak memiliki rutinitas yang memanfaatkan air seperti memasak, mandi, minum dan lain-lain. Dalam rutinitas ini banyak masyarakat mengeluh karena penggunaan air lebih besar daripada pasokan air. Sehingga kekosongan air dipagi hari yang menyebabkan beberapa masyarakat malas membayar iuran PDAM. karena kepuasan pelanggan PDAM tidak terpenuhi maka peraturan pembayaran iuran tidak terlaksana dengan baik.

TINJAUAN TEORITAS

Air merupakan sumber daya yang klasifikasinya dapat digolongkan baik ke dalam sumber daya yang diperbarukan maupun tidak diperbarukan, tergantung pada sumber dan pemanfaatannya. Air yang bersumber dari bawah tanah atau groundwater, misalnya, diperoleh melalui proses geologi selama ratusan bahkan ribuan tahun, sehingga meskipun memiliki kemampuan untuk memulihkan kembali (recharge rate) lewat hujan, jika jumlah yang dimanfaatkan melebihi kemampuan recharge, groundwater sering dikatakan sebagai sumber daya yang tidak diperbarukan. 19

Universitas Teknologi Sumbawa Sebaliknya, air permukaan atau surface water seperti air yang diperoleh dari sungai maupun danau dapat dikategorikan sebagai sumber daya terbarukan karena adanya proses siklus hidrologi dari bumi (Fauzi,2004).

Didaerah baiti jannati wilayah sumbawa nusa tenggara barat air digunakan sebagai sarana unruk memasak, mandi, mencuci, dan lain-lain sebagainya.akan tetapi air sangatlah susah,dikarenakan posisi tempat ini memiliki tanah tidak datar dan jauh di atas permukaan air begitu juga air sumur tidak ada dikarenakan susahnya air. maka dari itu masyarakat di baiti jannati lebih mengambil jalan untuk menyalurkan air bersih, dengan demikian PDAM sendiri merupakan jalan satusatunya untuk penyaluran air bersih di perumahan baiti jannati,perumahan ini merupakan perumahan yang padat dan memiliki penduduk yang banyak maka dari itu ketikan meyalurkan pdam ke perumahan ini akan memiliki banyak keuntungan bagi pdam sendiri dan masyarakat disana akan bisa terpenuhi di kebutuhan pasokan air.akan tetapi hal ini tidak sesuai dengan apa yang di prediksi dikarenakan semakin banyaknya pengguna pdam akan mengakibatkan penggunaan air yang berlebihan dan menyebabkan air cepat habis sering masyarakat di baiti jannati mengalami keluhan air mati sehingga mengakibatkan masyarakat terbengkalai dalam kegiatan rutinitasnya.

Menurut RUPES (2009: 2), definisi jasa lingkungan adalah penyediaan, pengaturan, penyokong proses alami, dan pelestarian nilai budaya oleh suksesi alamiah dan manusia yang bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan. Jadi dengan demikian, pemanfaatan jasa lingkungan adalah suatu upaya pemanfaatan potensi jasa (baik berupa jasa penyediaan, jasa pengaturan, jasa budaya, maupun jasa pendukung) yang diberikan oleh fungsi ekosistem dengan cara tidak merusak dan tidak mengurangi fungsi pokok ekosistem tersebut.

Pemanfaatan sumber daya alam dengan cara-cara yang melampaui potensi pemulihan alami akan mempengaruhi ketersediaan jasa lingkungan di masa mendatang. Jika terus berlanjut, keberadaan aset lingkungan akan menurun tajam dan jasa lingkungan yang saat ini diperoleh cuma- cuma akan hilang atau menjadi mahal. Pada akhirnya, hal tersebut akan membahayakan kesejahteraan manusia (RUPES, 2009: 3).

Menurut Wunder (2005), suatu ekosistem menyediakan suatu jasa lingkungan yang memiliki empat fungsi penting yaitu :

1. Jasa penyediaan (provising services) adalah penyediaan sumber daya alam berupa sumber bahan makanan, obat-obatan alamiah, sumber daya genetik, kayu bakar, serat, air, mineral dan lain-lain.
2. Jasa pengaturan (regulating services), jasa pengaturan yang fungsi sebagai menjaga kualitas udara,pengeturan iklim, pengaturan air, pengontrol erosi, pengaturan untuk menjernihkan air, pengaturan pengelolaan sampah, pengaturan untuk mengontrol penyakit, pengaturan untuk mengurangi resiko yang menghambat perbaikan kualitas lingkungan dan lain-lain.
3. Jasa kultural (cultural services), jasa cultural yang dimaksud disini adalah jasa lingkungan sebagai identitas dan keragaman budaya, nilai-nilai religious dan spiritual, pengetahuan, inspirasi, nilai estetika, hubungan sosial, rekreasi, dan lain-lain.

4. Jasa pendukung (supporting services), jasa pendukung yang dimaksud disini adalah jasa lingkungan sebagai produksi utama yang memproduksi oksigen.

Wunder (2005) mendefinisikan pembayaran jasa lingkungan (PJL) adalah sebuah transaksi sukarela dengan kerangka kerja yang telah dinegosiasikan. Dalam pembayaran jasa lingkungan tersebut terdapat jasa lingkungan yang dapat terukur, di samping itu terdapat minimal satu pembeli jasa lingkungan dan satu penyedia jasa lingkungan yang memelihara keberlangsungan jasa lingkungan yang diperjual belikan tersebut sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan saat negosiasi.

Menurut USAID (2007), karena konsep PES relatif baru, maka tidak semua skema kontrak PES yang berkembang telah memiliki kesempurnaan dan siap diperbanyak untuk daerah lain. Dalam Kongres Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Negara-negara Amerika Latin 2003, Forum on Payment Schemes for Environmental Services in Watershed mengidentifikasi pembelajaran yang diperoleh dari pengalaman pengembangan skema PES di Amerika Latin, yaitu bahwa:

1. Hingga sekarang skema PES pada pengelolaan DAS yang dikembangkan masih sangat beragam dengan tahapan kemajuan yang berbeda-beda dan untuk berbagai tujuan mulai dari tingkatan mikro dengan fokus yang sangat spesifik hingga tingkatan nasional yang dikontrol oleh negara. Namun banyak pula skema PES yang beroperasi tanpa kerangka peraturan yang spesifik.
2. Penerapan skema PES di Negara-negara Amerika Latin tergolong sudah maju di antara negara- negara berkembang lainnya, namun belum semua penerapan skema PES tersebut terinventarisasi secara baik dan masih memerlukan kajian-kajian sosial ekonomi dan kaitannya terhadap lingkungan.
3. Masih adanya ketidakpastian hubungan sebab akibat yang signifikan antara penggunaan lahan dan jasa-jasa yang dihasilkan.
4. Pada banyak kejadian, penyedia jasa tertarik dengan skema PES dalam kerangka pengelolaan DAS masih sangat bervariasi.
5. Di beberapa kasus, institusi publik yang terlibat kebanyakan adalah institusi lokal dibandingkan dengan institusi yang berskala nasional.
6. Penerapan skema PES yang berkembang secara potensial dapat direplikasi ke berbagai lokasi.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah pelanggan PDAM Sumbawa yang berada di perumahan baiti jannati kelurahan samapuin kabupaten Sumbawa. Sedangkan untuk menentukan jumlah sampel yang akan diambil dilakukan dengan formula Slovin (Sevilla dkk., 1993):

$$n = \frac{2 N e}{N + e}$$

Dimana:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Tingkat kesalahan pengambilan sampel yang ditolerir diketahui:

N = 200 orang ;

e = 10%

maka $n = 200 / (1 + (200 \times (0,1)^2)$

$200 / (1 + 2)$

$200 / 3 = 66,666$ dibulatkan menjadi 67

Analisis Tingkat Penerimaan Responden terhadap Pembayaran Jasa Lingkungan Untuk menentukan tingkat penerimaan responden terhadap pembayaran jasa lingkungan sebagai upaya konservasi dikumpulkan berupa data binner. Data binner merupakan bentuk data yang menggambarkan pilihan “Ya atau Tidak”. Dengan kondisi seperti ini, jenis penggunaan regresi yang sesuai untuk pemodelan adalah regresi logit (Ramanathan, 1997). Hal yang membedakan model regresi logit dengan regresi biasa adalah perubahan terikat dalam model bersifat dikotomi (Hosmer dan Lameshow, 1989). Bentuk fungsi ini model logit adalah :

$$Li = \beta_0 + \beta_1 KAi + \beta_2 JPAi + \beta_3 JKAi + \beta_4 JRSAi + \beta_5 TPi + \beta_6 RPDT + \epsilon_i ..$$

(6) dimana :

Li = Peluang responden bersedia (bernilai 1 untuk “bersedia” dan bernilai 0 untuk “tidakbersedia”)

β_0 = Intersep

β_1, \dots, β_7 = Koefisien dari regresi U = Umur (tahun)

JKT = Jumlah keluarga yang di tanggung (orang) P = Pekerjaan

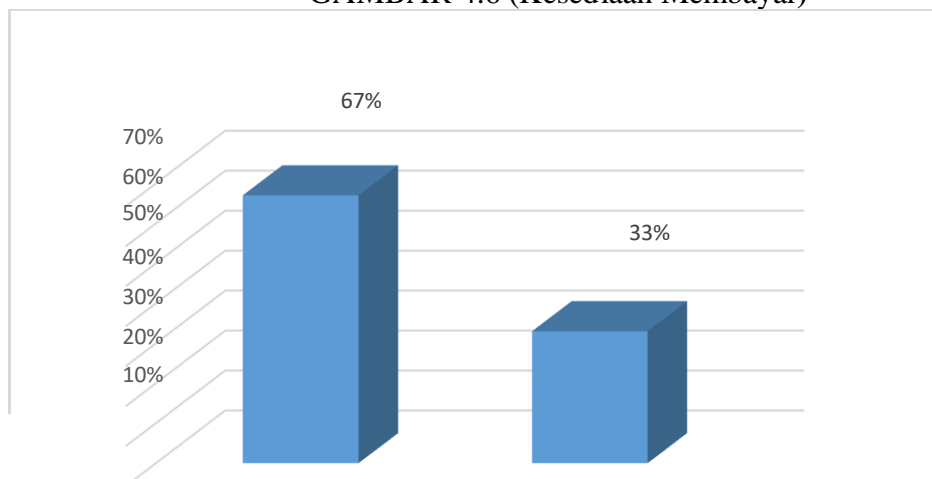
TP = Tingkat pendidikan responden (tahun)

RPDT = Rata-rata pendapatan rumah tangga (Rp/bulan) i = Responden ke-i (i = 1, 2, ..., n)

ϵ = Galat $\beta_1, \dots, \beta_7 > 0$

HASIL PENELITIAN

GAMBAR 4.6 (Kesediaan Membayar)



U%		bersedia	tidak bersedia
Series 1		67%	33%

Berikut pada Gambar-4.6 ditampilkan distribusi pilihan bersedia dan tidak bersedia responden dalam membayar pembayaran jasa lingkungan sebagai upaya konservasi terhadap mata air.

Pada penelitian ini responden yang diwawancarai sebanyak 67 responden dimana mereka diminta pendapatnya mengenai kesediaan untuk melakukan pembayaran jasa lingkungan walaupun di sumbawa belum memberlakukan perda pembayaran jasa lingkungan. Hal tersebut disebabkan karena terdapat beberapa responden yang setuju dilakukan upaya konservasi namun tidak bersedia membayarpembayaran jasa lingkungan. Alasan responden yang menjawab bahwa mereka setuju dengan upaya konservasi yang akan dilakukan namun tidak bersedia untuk membayar adalahresponden merasa bahwa mereka tidak mempunyai uang lebih untuk jasa lingkungan yang mereka terima, mereka menganggap air yang digunakan merupakan anugerah dari Tuhan yang dapat dinikmati tanpa harus mengeluarkan uang, dan mereka beranggapan bahwa hal ini merupakan tanggung jawab 62 pemerintah untuk memberikan sedikit anggaran pemerintah untuk melestarikan kualitas dan kuantitas mata air.

Berdasarkan pendapat responden mengenai kesediaannya untuk membayar pembayaran jasa lingkungan terdapat 45responden (67 persen) yang bersedia membayar pembayaran jasa lingkungan. Sedangkan 22 responden (33 persen) tidak bersedia membayar pembayaran jasa lingkungan. Alasan responden yang bersedia membayar pembayaran jasa lingkungan adalah bahwa dengan adanya upaya konservasi di mata air maka mereka dapat memanfaatkan jasa lingkungan yang disediakan oleh mata air tersebut sampaignerasi mendatang.

Tabel 4.9

Uji wald

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step	umur	-.277	.157	3.107	1	.078	.758
1 ^a	jumlah_anggota_keluarga	.765	.545	1.969	1	.161	2.148
	pendidikan_terakhir	.362	.535	.459	1	.498	1.437
	Pendapatan	.000	.000	5.785	1	.016	1.000
	pekerjaan	1.150	.674	2.911	1	.088	3.158
	Constant	.204	3.621	.003	1	.955	1.226

a. Variable(s) entered on step 1: umur, jumlah_anggota_keluarga, pendidikan_terakhir,Pendapatan, pekerjaan.

1. Umur

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa di peroleh nilai wald sebesar 3.107 (Sig 0,078).nilai signifikansi 0,078 lebih besar dari nilai 0,05, maka dapat di simpulkan bahwa hipotesis ditolak yaitu variabel umur tidak berpengaruh signifikan terhadapkesediaan membayar.

2. Keluarga Yang Di Tanggung

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa di peroleh nilai wald sebesar 1.969 (sig0,161),yaitu nilai signifikansi 0,161 lebih besar dari nilai 0,05,maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak yaitu variabel jumlah anggota keluarga tidakberpengaruh signifikan terhadap kesediaan membayar.

3. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa di peroleh nilai wald sebesar 0,459 (sig0,498),yaitu nilai signifikansi 0,498 lebih besar dari nilai 0,05,maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak yaitu variabel tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kesediaan membayar.

4. Pendapatan

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa di peroleh nilai wald sebesar 5.785 (sig0.016),yaitu nilai signifikansi 0.016 lebih kecil dari nilai 0,05,maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis di terima yaitu variabel jumlah pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kesediaanmembayar.

5. Pekerjaan

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa di peroleh nilai wald sebesar 0.003 (sig0.955),yaitu nilai signifikansi 0.955 lebih besar dari nilai 0,05,maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis di terima yaitu variabel jumlah pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kesediaanmembayar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kesediaannya untuk membayar pembayaran jasa lingkungan terdapat 45 responden (67 persen) yang bersedia membayar pembayaran jasa lingkungan. Sedangkan 22 responden (33 persen) tidak bersedia membayar pembayaran jasa lingkungan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membayar dari responden di perumahan baiti jannati yang dilakukan dengan analisis regresi logistik. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa variabel umur, keluarga yang di tanggung, pekerjaan dan pendidikan terakhir, tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesediaan membayar.sedangkan pendapatan ,yaitu nilai signifikansi 0.016 lebih kecil dari nilai 0,05,maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis di terima yaitu variabel jumlah pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kesediaan membayar.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang di ambil, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi pengelola air PDAM sumbawa lebih meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana yang digunakan untuk meningkatkan minat masyarakat berlangganan air PDAM.
2. Bagi pengelola PDAM sumbawa untuk lebih menjaga ke stabilan air agar masyarakat khususnya di perumahan baiti tetap merasa puas terhadap pelayanan air PDAM.
3. Bagi pengelola sebaiknya selalu memprioritaskan pelanggan PDAM karena banyak masyarakat yang mau membayar demi kelancaran dan konservasi pemanfaatan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewantara, I. G. Y., Suyitno, B. M., Lesmana, I, G. E. 2018. *Desalinasi Air Laut Berbasis Energi Surya Sebagai Alternatif Penyedia Air Bersih*. Jurnal Teknik Mesin. Vol 7 (1)
- Fauzi, A., Ph.D., 2004, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan : Teori dan Aplikasi*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Merryana, Annissa. 2009. *Analisis Willingness To Pay Masyarakat Terhadap Pembayaran Jasa Lingkungan Mata Air Cirahab*. Skripsi Departemen Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.
- Research. Center for International Forestry Research.
- RUPES (Rewards For Use Of And Shared Investment In Pro-Poor Environmental Service)*. 2009. *Gagas Kebijakan Konsep Jasa Lingkungan dan Pembayaran Jasa Lingkungan di Indonesia*. Bogor: RUPES World Agroforestry Center ICRAF Southeast Asia Regional Office.
- Sevilla, Consuelo G., dkk. 1993. *Pengantar metode penelitian*. Jakarta: UI Press.
- Wunder, Sven. 2005. *Payment for Environmental Services, Some Nuts and Bolts*. Yunus, A dan Haryanto A. 2019. *Kajian Pengembangan Imbal Jasa Lingkungan Di Daerah Aliran Sungai (Das) Kampar*. Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan